

MENCIPTAKAN BIBIT UNGGUL SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG KEARSIPAN

Stella Maris Putri Nirwana¹, Yohanes Maryono²

(Mahasiswa Program Studi Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi- Departemen Bahasa, Seni dan Manajemen Budaya (DBSMB) Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada)¹

ASM Marsudirini Santa Maria²

Email: stellamarisputrin@mail.ugm.ac.id¹, y.maryono@gmail.com²

ABSTRACT

This article is the result of a literature study focusing on efforts to create archival human resources in Indonesia. Archives as evidence of various events have a very important meaning for the continuity of a country and really need educated and superior resources. Assumption that the field of archives can be managed by anyone is a particular concern, even though archive management requires special competencies that require academic, professional and practical skills. Therefore, Indonesia needs to increase the quantity and quality of human resources in the archive field through the opening of archival study programs in formal tertiary education institutions starting from the undergraduate, postgraduate, and doctoral levels and to provide job vacancies in archiving. It is hoped that these ecosystems will increase public interest in getting involved in archiving.

Keywords: archiving, archivist, archives study program

ABSTRAK

Artikel ini merupakan hasil studi literatur yang berfokus pada upaya menciptakan sumber daya manusia bidang kearsipan di Indonesia. Arsip sebagai bukti dari berbagai peristiwa memiliki arti yang sangat penting bagi kelangsungan suatu negara dan sangat membutuhkan sumber daya yang terdidik dan unggul. Adanya anggapan bahwa bidang kearsipan dapat dikelola oleh siapapun menjadi keprihatinan tersendiri padahal pengelolaan kearsipan menuntut kompetensi khusus yang membutuhkan kemampuan akademis, profesional, dan praktis. Oleh karena itu Indonesia perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM di bidang kearsipan melalui pembukaan program studi kearsipan di lembaga pendidikan formal perguruan tinggi mulai dari jenjang S1/D4, S2, dan S3 serta menyediakan lowongan kerja di bidang kearsipan. Ekosistem yang tercipta dengan pembukaan pendidikan formal bidang arsip serta lowongan bagi tenaga kerja arsiparis diharapkan akan dapat meningkatkan animo masyarakat untuk terjun di bidang kearsipan.

Kata kunci: pengarsipan, pengarsip, program studi kearsipan

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang telah melewati berbagai macam peristiwa dalam sejarah, mulai dari peristiwa proklamasi kemerdekaan, peristiwa pemberontakan-pemberontakan, demo, pergerakan massa dan sebagainya. Peristiwa yang dimaksud tidak hanya peristiwa yang terjadi dalam skala nasional melainkan juga peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Setiap peristiwa tersebut pasti menyimpan kisah yang unik dan tentu saja memiliki pengaruh terhadap bangsa Indonesia sekarang ini. Berbagai macam peristiwa yang terjadi di masa lalu dapat diakses dan diketahui dengan mudah di zaman sekarang melalui rekaman peristiwa yang telah didokumentasikan/diarsipkan baik dalam bentuk teks, gambar, suara, video, dan lain-lain.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik, pada Pasal 7 menyebutkan bahwa: Badan publik (1) wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik selain informasi publik yang dikecualikan sesuai ketentuan, (2) memiliki kewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, serta (3) harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Ketiga kewajiban badan publik di atas sudah pasti menuntut ketersediaan sumber daya yang terdidik dan unggul. Pertanyaannya adalah apakah sumber daya seperti dimaksud sudah terpenuhi baik dari sudut pandang kuantitas maupun kualitas? Siapa yang harus bertanggung jawab menciptakan sumber daya tersebut?

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan arti pentingnya arsip bagi organisasi maupun lembaga pemerintah dan realitas kearsipan di Indonesia yang masih belum mendapatkan penanganan secara memadai karena kurangnya SDM kearsipan yang kompeten dan profesional serta memberikan kontribusi pemikiran mengenai perlunya upaya dari lembaga pendidikan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan SDM kearsipan melalui pembukaan program studi kearsipan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dan bersifat kajian literatur. Data diperoleh dari sumber-sumber informasi online yang mengungkap fakta bidang kearsipan di Indonesia serta jurnal-jurnal yang mengkaji kearsipan serta jurnal-jurnal penelitian kearsipan sehingga diperoleh gambaran valid mengenai fakta kearsipan di Indonesia. Dari gambaran valid ini diperoleh simpulan bahwa kearsipan di Indonesia masih belum ditangani secara baik karena kurangnya SDM kearsipan yang profesional dan kompeten. Oleh karena itu, mengingat pentingnya arsip bagi organisasi maupun lembaga pemerintah, penyediaan SDM kearsipan baik secara kuantitas maupun kualitas perlu segera dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga pendidikan formal untuk memajukan kearsipan di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Arsip sebagai Bukti

Salah satu contoh bahwa arsip sangatlah berguna dan dapat menjadi bukti atas terjadinya suatu peristiwa adalah dapat mengetahui proses kemerdekaan berlangsung karena adanya perekaman peristiwa seputar proklamasi seperti adanya foto perancangan teks proklamasi kemerdekaan, foto pembacaan teks proklamasi, arsip berita mengenai proklamasi kemerdekaan,

arsip teks proklamasi, dan video proklamasi kemerdekaan. Bahkan *draft* teks proklamasi kemerdekaan yang ditulis di secarik kertas oleh Soekarno yang sempat dibuang dan pada akhirnya diselamatkan oleh jurnalis BM Diah pun dapat menjadi kunci bagi kelengkapan arsip seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari hal-hal ini dapat disimpulkan bahwa arsip sekecil apa pun dapat menjadi bukti dan menjadi kunci dari sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia (Kuwado, 2021).

Berbicara mengenai arsip sebagai bukti yang valid dan autentik mengenai terjadinya suatu peristiwa pasti ingatan juga tak akan luput dari peristiwa sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang diperebutkan oleh Malaysia dan Indonesia sejak tahun 1969. Namun pada akhirnya Mahkamah Internasional di Den Haag memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan dinyatakan sebagai wilayah Malaysia pada tanggal 17 Desember 2002. Hal ini merupakan kekalahan besar bagi Indonesia dan menimbulkan kemarahan dan kekecewaan bagi masyarakat Indonesia. Apabila dilihat lebih jauh, ternyata kekalahan Indonesia atas Malaysia ini disebabkan oleh kurangnya arsip yang dapat mendukung bukti kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan oleh Indonesia. Indonesia mendapat kekalahan di mata Mahkamah Internasional karena tidak memiliki arsip yang bernama *administration record* yang sangat penting untuk dapat menjadi penentu kepemilikan lahan di perbatasan tersebut (Utami, 2022). *Administration record* yang dimaksud adalah arsip mengenai pengolahan lahan. Malaysia mempunyai arsip *administration record* tersebut yang berkaitan dengan penarikan pajak umum dan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut (Djalal H. , 2017). Dari peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa arsip sangat mendukung kedaulatan negara yang sekaligus dapat menjadi bukti yang kuat untuk memenangkan suatu permasalahan atau sengketa. Maka dari itu, sudah selayaknya Indonesia mulai belajar dalam pengelolaan arsip-arsipnya.

2. Realita Pengelolaan Arsip di Indonesia

Melihat kenyataan di Indonesia, pengelolaan kearsipan memang masih sangat kurang diperhatikan. Banyak sekali organisasi yang bahkan tidak melakukan pengelolaan terhadap arsip-arsip yang mereka ciptakan (Haryanti & Wasisto, 2018). Organisasi yang setiap kali melakukan kegiatan pasti menghasilkan suatu arsip, akan tetapi arsip tersebut tidak dikelola. Pada akhirnya arsip-arsip tersebut hanya menjadi tumpukan di ruang kerja, bahkan hanya ditumpuk lalu dimasukkan ke dalam karung dan disimpan di dalam gudang yang lembab dan kotor yang bahkan sama sekali tidak layak. Lebih parahnya lagi, apabila gudang tempat penyimpanan arsip sudah tidak mampu menampung arsip lagi, biasanya tumpukan arsip hanya dibiarkan berceceran di lingkungan sekitar organisasi tersebut, entah dibungkus menggunakan kardus ataupun karung. Bahkan sering terjadi juga tumpukan arsip dibiarkan saja di lorong, tangga, dan bawah tangga yang bisa menyebabkan risiko terhadap produktivitas dan keselamatan kerja.

Realita yang terjadi ini bahkan terjadi pada banyak sekali organisasi, tak terkecuali pada organisasi pemerintahan sekalipun. Padahal apabila ditelisik lebih lanjut, keberadaan arsip sangatlah berguna, baik untuk hal administrasi organisasi maupun yang berkaitan dengan hal vital organisasi. Suatu arsip dapat digunakan untuk pembuktian bahwa suatu kegiatan atau peristiwa benar-benar terjadi. Akan tetapi pada kenyataannya, masih banyak orang yang seakan menutup

mata dan tidak melihat bahwa arsip adalah sesuatu yang penting untuk dikelola secara layak. Alasan utama organisasi tidak memperhatikan arsipnya adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten yang tidak mengetahui pengelolaan arsip yang optimal yang dapat menyebabkan hilang dan rusaknya arsip. Padahal manajemen kearsipan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mempermudah penemuan file kembali yang akan memperlancar kegiatan berorganisasi (Masduki & Kholik, 2020).

Seringkali dijumpai bahwa organisasi tidak memiliki posisi khusus atau orang yang ditunjuk secara khusus sebagai pengelola dokumen organisasinya. Pada akhirnya, arsip hanya dikelola apabila organisasi memiliki waktu saja, menunggu sampai arsip sudah benar-benar menumpuk dan pengelolaan arsip tidak dilakukan secara terus menerus dan berkala.

3. Arsiparis di Indonesia

Menurut Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Penyesuaian/*Inpassing* pasal 1 dijelaskan “arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan” (Handayani & Sari, 2018). Namun demikian masih banyak orang yang beranggapan bahwa siapa pun dapat menjadi arsiparis. Padahal bidang kearsipan tidak dapat dilaksanakan oleh sembarangan orang, hanya orang-orang profesional yang memiliki kompetensi dan keahlian khususlah yang dapat menjadi arsiparis. Bahkan di beberapa negara, profesi arsiparis ini dibagi menjadi dua yaitu pengelola arsip statis dan pengelola arsip dinamis, sedangkan di Indonesia kedua posisi tersebut dilakukan oleh satu orang saja.

Realita yang benar-benar mengagetkan adalah posisi arsiparis di lembaga kearsipan daerah yang sebagian besar masih merupakan orang-orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan kearsipan (Octafiona, Kesuma, & Bashori, 2020). Hal ini menimbulkan persepsi mengenai pengelolaan kearsipan apakah memang tidak harus mempunyai keahlian dan keterampilan khusus dan apakah hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kualitas pengelolaan kearsipan di Indonesia masih cukup rendah? Adanya arsiparis yang menjabat yang tidak berlatar belakang pendidikan kearsipan juga dipengaruhi oleh kurangnya sumber daya kearsipan di Indonesia.

4. Urgensi Studi Lanjut SDM Kearsipan

Karena pentingnya memajukan arsip di Indonesia maka dalam tulisan ini akan dibahas mengenai realita pengelolaan kearsipan di Indonesia yang pada akhirnya akan memunculkan pertanyaan mengenai seberapa penting studi lanjut bagi Sumber Daya Manusia di bidang kearsipan karena Sumber Daya Manusia merupakan hal yang paling pertama dan utama yang mempengaruhi kualitas pengelolaan kearsipan. Seluruh proses pengelolaan kearsipan akan sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia penggerakannya.

Menurut Perka ANRI Nomor 43 Tahun 2009, “arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dengan berbagai bentuk dan media yang sesuai dengan perkembangan teknologi yang

diciptakan oleh organisasi, lembaga, perusahaan, maupun individu”. Arsip merupakan hal yang familiar dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kegiatan atau peristiwa pasti menghasilkan suatu arsip yang berguna bagi organisasi maupun individu. Akan tetapi pada kenyataannya, pengelolaan arsip di Indonesia masih cenderung luput dari perhatian organisasi yang bersangkutan. Hal-hal yang menjadi latar belakang pengelolaan kearsipan di Indonesia masih sangat kurang di antaranya adalah sumber daya manusia kearsipan yang cenderung kurang berkualitas serta sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan yang tidak memadai, bahkan tidak layak sama sekali.

5. Upaya Peningkatan Kualitas SDM Kearsipan

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai pembina penyelenggaraan kearsipan di Indonesia sudah melakukan berbagai hal terkait pembinaan terhadap penyelenggaraan kearsipan di Indonesia yang bertujuan turut serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia kearsipan atau arsiparis dengan mengadakan berbagai macam pelatihan, seminar, dan workshop yang berkaitan dengan kearsipan (Bramantya, 2020). Bahkan ANRI juga telah bersama-sama dengan beberapa universitas di Indonesia untuk turut menciptakan SDM kearsipan yang berkualitas (Agustina, 2021).

Kepala ANRI, Dr Mustari Irawan, M.PA., dalam Seminar Kearsipan Nasional 2017 yang diadakan oleh program studi kearsipan Universitas Gadjah Mada mengatakan bahwa Indonesia memiliki kekurangan Sumber Daya Manusia di bidang kearsipan sebanyak 140.389 orang (97,75%). Sebenarnya, kebutuhan arsiparis bagi instansi pemerintah dan swasta sangat tinggi, akan tetapi tidak dibarengi dengan ketersediaan jumlah arsiparis yang memadai dan berkualitas. Hal inilah yang menjadikan arsiparis di Indonesia sangat langka. Hal ini tentunya juga dipengaruhi oleh anggapan masyarakat mengenai profesi kearsipan yang masih dipandang sebelah mata. Bahkan, program studi kearsipan di beberapa universitas juga jarang disorot dan tidak mendapat perhatian masyarakat umum, sering dinomor duakan, dan sering dianggap sebagai “buangan”. Selain itu, sumber daya kearsipan juga masih sangat jarang diakui dan diberikan penghargaan (Ika, 2017).

6. Keberadaan Program Studi Kearsipan di Indonesia

Apabila ditelisik lebih lanjut, program studi yang berkaitan dengan kearsipan memang masih sangat langka dan tentunya sangat jarang didengar oleh masyarakat umum. Bahkan di Indonesia saja hanya beberapa universitas yang menyediakan program studi kearsipan, diantaranya adalah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Padang dan Universitas Terbuka (Agustina, 2021). Selain itu, jenjang program studi kearsipan yang ditawarkan oleh perguruan tinggi juga hanya sampai diploma 4 (sarjana terapan). Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa memang ketersediaan pendidikan formal kearsipan di Indonesia masih sangatlah terbatas. Dari segi lokasi, sebaran perguruan tinggi yang menawarkan program studi kearsipan juga hanya berpusat di pulau Jawa.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa program studi kearsipan masih jarang didengar dan belum bisa menjadi program studi unggulan pada suatu perguruan tinggi. Hal ini terjadi karena adanya stigma dari masyarakat mengenai profesi arsiparis yang cenderung masih dianggap sebelah

mata (Sudiyanto, 2014). Maka dari itu, pengenalan mengenai bidang kearsipan juga mulai dilakukan oleh lembaga kearsipan daerah yang merupakan salah satu pembina penyelenggaraan kearsipan di daerah. Hal-hal yang telah diupayakan oleh lembaga kearsipan daerah dalam rangka pengenalan kearsipan diantaranya adalah pengadaan pameran kearsipan, seminar kearsipan, hingga pengadaan diorama kearsipan yang telah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru saja diresmikan pada 24 Februari 2022 oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan didampingi oleh Imam Gunarto, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Semua upaya untuk mengenalkan mengenai dunia kearsipan tersebut patut untuk diapresiasi dengan harapan kearsipan semakin banyak dikenal oleh masyarakat dan profesi kearsipan semakin diakui oleh masyarakat (ANRI, 2022).

7. Tantangan Bagi SDM Kearsipan

Berbicara mengenai zaman yang semakin berubah yang diiringi dengan perkembangan teknologi informasi yang masif pula, kemajuan teknologi informasi memiliki peran begitu besar pada setiap aktivitas manusia pada saat ini. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan berbagai sektor kehidupan yang memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi, pendidikan, transportasi, kesehatan dan penelitian (Suryadi, 2015). Sebagian besar sektor dalam kehidupan manusia mulai secara perlahan mengadopsi teknologi. Tidak terkecuali dengan dunia kearsipan yang harus mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan mulai memasukkan serta mengadopsi teknologi di dalam penyelenggaraan kearsipan. Melihat kenyataan yang terjadi di Indonesia, Sumber Daya Manusia kearsipan di Indonesia mayoritas sudah berusia tua yang cenderung kurang melek terhadap teknologi. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi SDM kearsipan di masa depan, yang harus mempunyai tuntutan mengenai standar kompetensi yang memadai berkaitan dengan perkembangan teknologi dan informasi.

ANRI dan lembaga-lembaga kearsipan daerah memang telah ikut serta meningkatkan kualitas SDM kearsipan di Indonesia melalui berbagai pelatihan, seminar, workshop dan lain-lain. Namun apabila melihat ke masa depan, hal tersebut tidak cukup efektif untuk mempersiapkan bibit SDM kearsipan yang kompeten. Maka dari itu, sangat diperlukan studi lanjut bagi SDM kearsipan untuk mempersiapkan bibit-bibit SDM kearsipan di masa depan yang lebih unggul dan berkualitas.

8. Pentingnya Peningkatan Jumlah Pendidikan Formal Kearsipan

Upaya peningkatan kualitas SDM kearsipan tidak lepas dari peran perguruan tinggi dalam menyiapkan SDM kearsipan yang mumpuni. Di Indonesia, hanya terdapat beberapa universitas yang menawarkan program studi kearsipan. Program studi kearsipan memang masih sangat langka di Indonesia, tidak seperti program studi ilmu perpustakaan yang lebih jauh dikenal masyarakat. Program studi kearsipan juga termasuk ke dalam rumpun ilmu infomaso, yaitu ilmu interdisipliner yang membahas mengenai interpretasi informasi (Priyanto, 2013). Dibandingkan dengan program studi rumpun ilmu informasi seperti ilmu perpustakaan, program studi kearsipan masih jauh lebih

asing didengar. Kearsipan di Indonesia dapat menjadi semakin maju apabila jumlah perguruan tinggi dan pendidikan formal bertambah di berbagai jenjang termasuk diploma, sarjana terapan, pascasarjana, hingga program doktoral (Bramantya, 2020). Sistem seperti inilah yang masih harus dikembangkan untuk memajukan kearsipan di Indonesia.

Pada tahun 2014 disebutkan bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia akan mencanangkan pembangunan sekolah tinggi khusus kearsipan dalam lima tahun kedepan (Manafe, 2014). Hal ini direncanakan untuk menambah jumlah ketersediaan arsiparis di Indonesia karena Indonesia masih kekurangan arsiparis. Akan tetapi bahkan sampai tahun 2022, pembangunan sekolah tinggi dalam bidang kearsipan sama sekali belum terlaksana.

Namun sebelum itu, penambahan pendidikan formal kearsipan di Indonesia juga harus dibarengi dengan penambahan akademisi kearsipan. Tanpa adanya akademisi yang berkualitas maka pendidikan formal yang telah tercipta tidak akan berjalan dengan efektif. Untuk menciptakan akademisi yang berkualitas juga dibutuhkan pendidikan formal baik di jenjang S2 maupun S3. Studi lanjut bagi para calon akademisi dapat berupa studi lanjut ke S2 maupun S3 baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saat ini juga telah terdapat banyak sekali beasiswa yang bahkan berupa *fully funded scholarship* atau *partially funded scholarship* yang dapat menjadi opsi untuk studi lanjut. Dengan adanya kemudahan dan kesempatan yang ditawarkan, tentunya diharapkan akan meningkatkan motivasi dan kemauan untuk memulai studi lanjut.

9. Menciptakan Ekosistem Kearsipan

Penambahan pendidikan formal, akademisi, professional, maupun praktisi dalam bidang kearsipan diharapkan dapat menciptakan suatu ekosistem sumber daya manusia kearsipan yang optimal. Hal ini akan menjadi awal mula yang baik dalam memajukan sistem kearsipan di Indonesia. Ekosistem pendidikan formal kearsipan yang baik tentu juga harus diimbangi dengan pembukaan lowongan kerja bagi arsiparis seperti pada tahun 2017, 2018, dan 2019 yang mengalami lonjakan kebutuhan arsiparis. Pada tahun 2018 bahkan lowongan CPNS khusus arsiparis menembus angka 227 untuk ditempatkan di berbagai kementerian dan lembaga-lembaga negara (Bramantya, 2020). Diharapkan dengan adanya pembukaan lowongan CPNS ini akan meningkatkan minat masyarakat Indonesia untuk terjun dalam dunia kearsipan.

Hal lain yang tidak kalah penting selain penambahan jumlah program studi dan sumber daya manusia, adanya organisasi dan komunitas profesi kearsipan maupun alumni kearsipan juga dinilai sangat berguna. Dengan adanya organisasi maupun komunitas profesi kearsipan, akan terjalin relasi antar orang yang memiliki bidang yang sama yang akan berdampak pada mudahnya mencari jaringan relasi dan akan memperkuat jalinan di bidang kearsipan. Selain itu, terbentuknya organisasi dan komunitas profesi kearsipan juga dapat turut serta memperkenalkan dunia kearsipan kepada masyarakat luas dan pada akhirnya dalam masyarakat juga akan muncul 'rasa memiliki' arsip dan mereka meningkatkan kesadaran bahwa arsip sangat penting keberadaannya serta mendapat pengakuan dari masyarakat. Adanya relasi yang terjalin dapat menjadi ajang saling bertukar informasi, saling berdiskusi, bahu membahu dan saling membantu dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kearsipan di Indonesia.

Dengan ekosistem yang terjalin dengan baik antara akademisi, praktisi, professional, dan penggiat kearsipan, akan terwujud sistem kearsipan yang jauh lebih efektif dan efisien. Perlu diingat bahwa kemajuan negara akan sangat dipengaruhi oleh sistem kearsipannya. Maka dari itu, studi lanjut bagi SDM kearsipan sangat penting untuk peningkatan kualitas dan profesionalitas serta pada gilirannya dapat mengangkat profesi kearsipan di Indonesia.

Dengan adanya studi lanjut, bibit-bibit unggul kearsipan akan bertambah, selain itu juga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan arsiparis baik di sektor pemerintahan, sektor swasta, maupun di bidang pendidikan karena pengelolaan kearsipan di pemerintahan dan swasta juga masih tergolong sangat lemah dan perlu dikembangkan seiring dengan kemajuan teknologi informasi dewasa ini. Maka dari itu penciptaan dan regenerasi SDM kearsipan di berbagai sektor perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan.

C. Penutup

Kunci dari suatu negara yang maju adalah negara yang mempunyai sistem kearsipan yang baik karena arsip merupakan suatu hal yang sangat vital yang dapat digunakan untuk mempertahankan keberadaan dan kedaulatan suatu negara. Sebagai contoh, Belanda memiliki sistem kearsipan yang baik dan sudah sangat sadar bahwa arsip adalah hal yang sangat penting. Alasan kemajuan negara Belanda tak lain dan tak bukan adalah karena sistem kearsipannya yang sudah sangat maju.

Kini Indonesia sudah seharusnya belajar dari negara-negara lain dan dapat mengadopsi sistem kearsipan mereka. Tentunya Indonesia juga tidak ingin lagi kehilangan seperti pada kasus kehilangan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Peristiwa ini seharusnya dapat menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia agar membenahi sistem kearsipannya, dimulai dari penciptaan bibit-bibit SDM kearsipan yang profesional dan kompeten melalui pendidikan formal khususnya di lembaga pendidikan tinggi dan tentu saja diimbangi oleh pembukaan lowongan di bidang kearsipan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, G. (2021). Upaya Pemerintah dalam menanggulangi kelangkaan arsiparis di Indonesia. *Jurnal Ilmu Perpustakaan (JIPER)*, 3(2).
- ANRI (2022). Sri Sultan Hamengku Buwono X Didampingi Kepala Anri Resmikan Diorama Kearsipan Daerah Istimewa Yogyakarta. Retrieved from ANRI: <https://www.anri.go.id/publikasi/berita/sri-sultan-hamengku-buwono-x-didampingi-kepala-anri-resmikan-diorama-kearsipan-daerah-istimewa-yogyakarta>
- Bramantya, A. R. (2020). Peran pendidikan kearsipan dalam menghidupkan arsip dan kehidupan sosial. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 16 (1), 16-31.
- Bramantya, A. R., & Prasetyo, A. (2019). Between reality and the needs: Responsibilities of educational institutions in developing archival science in Indonesia. *Record and Library Journal*, 5(2), 136-149.

- Djalal, H. (2017). Penyelesaian sengketa Sipadan-Ligitan: Interpelasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 33(1), 127-133.
- Handayani, F., & Sari, R. (2018). Analisis Kompetensi Arsiparis Profesional Di Indonesia. *JUPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi)*, 3(2), 226-237.
- Haryanti, R. Y., & Wasisto, J. (2018). Sistem Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 7(4), 161-170.
- Ika. (2017). Indonesia kekurangan 140 ribu Arsiparis. [https://www.ugm.ac.id/id/berita/13864-indonesia-kekurangan-140-ribu-arsiparis#:~:text=Indonesia%20masih%20kekurangan%20tenaga%20ahli,arsiparis%20\(97%2C75%25\)](https://www.ugm.ac.id/id/berita/13864-indonesia-kekurangan-140-ribu-arsiparis#:~:text=Indonesia%20masih%20kekurangan%20tenaga%20ahli,arsiparis%20(97%2C75%25))
- Kuwado, F. (2021). Kisah para penyelamat Arsip Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/26/08382521/kisah-para-penyelamat-arsip-proklamasi-kemerdekaan-indonesia?page=all#page2>
- Manafe, D. (2014). Arsip Nasional akan bangun sekolah tinggi kearsipan. <https://www.beritasatu.com/pendidikan/203321-arsip-nasional-akan-bangun-sekolahtinggi-kearsipan.html>
- Octaviona, E., Kesuma, M., & Basyori, A. (2020). Kesiapan Arsiparis Menggunakan E-Arsip Dalam Tata Kelola Kearsipan Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Uin Raden Intan Lampung. *Jurnal El-Pustaka*, 1(1).
- Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang *Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Penyesuaian/Inpassing*
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang *Kearsipan*
- Priyanto, I. F. (2013). Apa dan Mengapa Ilmu Informasi? *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 1(1), 55-60.
- Sudiyanto. (2014). Upaya Pemerintah Menyiapkan Sdm Kearsipan Melalui Pendidikan Formal. Arsip UGM. http://arsip.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/401/2014/06/sdm_kearsipan_melalui_pendidikan_formal-1.pdf
- Suryadi, S. (2015). Peranan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran dan perkembangan dunia pendidikan. *Informatika*, 3(3), 9-19.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.* https://eppid.kominfo.go.id/storage/uploads/1_9_2-Undang_Undang_Nomor_14_Tahun_2008.pdf
- Utami, L. (2022). Cerita Lepasnya Sipadan-Ligitan Diungkap ANRI, Gara-gara Satu Arsip Ini Kalah dari Malaysia. <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/07/cerita-lepasnya-sipadan-ligitan-diungkap-anri-gara-gara-satu-arsip-ini-kalah-dari-malaysia?page=2>
- Yusuf, M., Masduki, M., & Kholik, A. (2020). Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Arsip dan Kearsipan. *Janaka, Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 59-64.